



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1137) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Nama pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 599

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
 DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2014
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Administratif	Penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)	Pertimbangan Teknis Pemanfaatan KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan
			Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP) di KKPN
			Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil di KKPN
			Karcis Masuk KKPN untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan
			Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil di KKPN
			Tanda Masuk KKPN untuk Penelitian
			Tanda Masuk KKPN untuk Pendidikan
2.	Administratif	Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Hiu dan Pari	Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh
			Rekomendasi Pari, Insang Pari, dan Kulit Pari
			Rekomendasi Produk Olahan Hiu dan Pari
3.	Administratif	Penerbitan Izin dan Rekomendasi Reklamasi	Izin Lokasi Reklamasi
			Izin Pelaksanaan Reklamasi
			Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi
			Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi

B. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Administratif	Perizinan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP)	SIUP Baru
			SIUP Perubahan
			SIUP Penggantian
2.	Administratif	Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	SIPI Baru
			SIPI Perubahan
			SIPI Perpanjangan
			SIPI Penggantian
			SIPI Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kapal 30-60 GT
3.	Administratif	Perizinan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	SIKPI Baru
			SIKPI Perubahan
			SIKPI Perpanjangan
			SIKPI Penggantian
4.	Administratif	<i>e-Services</i>	Perpanjangan Izin Melalui <i>e-Services</i>
5.	Administratif	Pelayanan <i>Regional Fisheries Management Organisation</i> (RFMO)	Pendaftaran Kapal ke RFMO
6.	Administratif	Pendaftaran Kapal Perikanan	Penerbitan Buku Kapal Perikanan (BKP)
7.	Administratif	Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
8.	Administratif	Dokumen Pembuatan Kapal Perikanan	Persetujuan Pembangunan/ Pengadaan/ Modifikasi Kapal Perikanan
			Rekomendasi Teknis Sebagai Kapal Perikanan
9.	Jasa	Konsultasi Pembuatan Kapal Perikanan	Konsultasi Desain dan Spesifikasi Teknis Kapal Perikanan
			Konsultasi Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan/Alat Bantu Penangkap Ikan
10.	Jasa	Pelatihan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Pelatihan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
11.	Administratif	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan ikan	Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan ikan (SKPPI)
12.	Administratif	Penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan	Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)
13.	Administratif	Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan	Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI)
14.	Administratif	Pelayanan Cara Penanganan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
15.	Administratif	Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan	Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan
			Perjanjian Pemanfaatan Lahan di atas 500 m ² dan/atau Bangunan di atas 250 m ² di Pelabuhan Perikanan
			Rekomendasi Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan
			Perjanjian Pemanfaatan Lahan di bawah 500 m ² dan/atau Bangunan di bawah 250 m ² di Pelabuhan Perikanan
16.	Administratif	Pelayanan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL)	STBL Keberangkatan Kapal
			STBL Kedatangan Kapal
17.	Administratif	Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
18.	Administratif	Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
19.	Jasa	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Pelayanan Tambat Labuh
			Pelayanan Bongkar/Muat
			Pelayanan Jasa Listrik
			Pelayanan Jasa Bengkel
			Pelayanan <i>Dock</i>
			Pelayanan <i>Floating Repair</i>
Pelayanan Pas Masuk			

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
			Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan
			Pelayanan Penyimpanan pada Unit Pendingin
			Penjualan Es
			Penjualan Air
			Penyewaan Peralatan Pelabuhan Perikanan

C. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Adminstratif	Penerbitan Surat Ijin Penyediaan/Peredaran Obat Ikan	Surat Izin Penyediaan/Peredaran Obat Ikan
2.	Adminstratif	Penerbitan Surat Nomor Pendaftaran Obat Ikan	Surat Nomor Pendaftaran Obat Ikan
3.	Adminstratif	Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan /Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/Obat Ikan/Sampel Obat Ikan	Surat Keterangan Pemasukan/Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/ Obat Ikan/Sampel Obat Ikan
4.	Adminstratif	Penerbitan Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup	Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup
5.	Adminstratif	Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) di Bidang Pembudidayaan Ikan
6.	Adminstratif	Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup	Surat Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup
7.	Adminstratif	Penerbitan Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal	Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal
8.	Adminstratif	Sertifikasi Pendaftaran Pakan Ikan	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
9.	Adminstratif	Penerbitan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/ Bahan Baku Pakan Ikan	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/ Bahan Baku Pakan Ikan
10.	Jasa	Pengujian Laboratorium	Laporan Hasil Uji

D. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Adminstratif	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
2.	Adminstratif	Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan	Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP)
3.	Adminstratif	Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Perikanan	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Hasil Perikanan

E. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Adminstratif	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	Registrasi Transmitter SPKP
			Pemantauan Pergerakan Kapal Perikanan (Informasi <i>Plotting</i> dan <i>Tracking</i>)
			Pemberian akses pemantauan kapal perikanan (<i>username/password</i>)
2.	Adminstratif	Pemeriksaan Kelaikan Operasi Kapal Perikanan dalam Rangka Penerbitan Surat Laik Operasi	Surat Laik Operasi (SLO)

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
3.	Adminstratif	Verifikasi Pendaratan Ikan sebagai Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)

F. BADAN RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Jasa	Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN	Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN
2.	Jasa	Pelatihan <i>Basic Safety Training</i>	Pelatihan <i>Basic Safety Training</i>
3.	Jasa	Pengujian Laboratorium	Laporan Hasil Uji

G. BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Administratif	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor
2.	Administratif	Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor	Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor
3.	Administratif	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar
4.	Administratif	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor
5.	Administratif	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk
6.	Administratif	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Badan Hukum	Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Badan Hukum

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
7.	Administratif	Penjaminan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan	Penjaminan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan
8.	Administratif	Penjaminan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis HACCP	Penjaminan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis HACCP
9.	Administratif	Pengurusan Izin Ekspor (<i>Approval Number</i> / Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra	Pengurusan Izin Ekspor (<i>Approval Number</i> / Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra
10.	Jasa	Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
11.	Jasa	Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan
12.	Barang	Penyediaan Bahan Uji Kontrol Positif (Pembanding)	Penyediaan Bahan Uji Kontrol Positif (Pembanding)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

